

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Prawirodirjan

A. Organisasi

Struktur kepengurusan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Prawirodirjan tercantum dalam SK Pokja Kampung KB Nomor 016/KEP/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Prawirodirjan. Kepengurusan ini terdiri dari 13 kader yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dari pihak BKKBN. Proses pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Prawirodirjan berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas Prawirodirjan telah melaksanakan berbagai kelompok kegiatan (POKTAN) seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL),

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Sosialisasi dan koordinasi program dilakukan melalui kelompok-kelompok PKK, dasawisma, serta pertemuan bapak-bapak (Sarasehan). Fasilitas seperti tempat pertemuan dan konsumsi didukung oleh kelurahan, sementara anggaran kegiatan berasal dari APBD, APBN, dan swadaya masyarakat.

B. Interpretasi

Interpretasi kebijakan dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Prawirodirjan dimulai dengan tahap sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, yang dilakukan saat berbagai kegiatan seperti pertemuan kelompok PKK dan sarasehan bapak-bapak. Dalam sosialisasi ini Kampung Keluarga Berkualitas Prawirodirjan melibatkan Petugas Keluarga Berencana (PKB), yang ikut memberikan informasi dan edukasi kepada warga tentang program serta manfaatnya. Selain itu, sosialisasi program ini juga mendapatkan dukungan penuh dari berbagai instansi terkait, seperti Kelurahan Prawirodirjan itu sendiri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta.

C. Aplikasi

Dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Prawirodirjan melibatkan koordinasi aktif antara berbagai

kelompok masyarakat seperti ibu-ibu dasawisma, kelompok BKKR, RT, RW, serta lintas sektor dari lembaga pemerintahan seperti BKKBN, DP3AP2KB, KUA, Puskesmas, Polsek, Babinsa, Koramil, dan kelurahan. Program ini melaksanakan berbagai kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Program ini juga memberikan manfaat ekonomi melalui toko PKK, pelatihan memasak dan bazar. Dalam proses pelaksanaannya juga dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh beberapa pihak seperti Kelurahan, BKKBN, dan DP3AP2KB yang secara rutin mengawasi berjalannya program. Proses pengawasan ini dilakukan setahun sekali.

D. Kesejahteraan Keluarga

Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Prawirodirjan menunjukkan bahwa pemenuhan indikator utama dalam teori implementasi Charles O. Jones, meliputi dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap indikator kesejahteraan keluarga menurut Miles dan Irwings. Indikator utama dalam teori implementasi Charles O. Jones yang meliputi dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi terbukti memiliki hubungan erat dan berperan penting dalam meningkatkan indikator kesejahteraan keluarga menurut Miles dan Irwings di Kelurahan Prawirodirjan. Dimensi organisasi yang mencakup tugas dan fungsi,

struktur, peran dan kompetensi, standar serta prosedur, dan fasilitas, memastikan pelaksanaan program yang terorganisir dan berkelanjutan, sehingga mendukung rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri keluarga. Dimensi interpretasi yang menekankan konsistensi pelaksanaan standar, sasaran, prosedur, serta komitmen pengelola, memperkuat keteraturan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan keterbukaan informasi, yang berdampak langsung pada peningkatan rasa aman dan kebebasan keluarga dalam berpartisipasi. Dimensi aplikasi, yang meliputi pelayanan dan pembayaran, ketercapaian manfaat, pengawasan, dan evaluasi, menjamin program berjalan tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan keluarga, meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pengelolaan yang komprehensif dan sinergis dari ketiga dimensi tersebut, program Kampung Keluarga Berkualitas berhasil meningkatkan rasa aman melalui fasilitas layanan kesehatan dan dukungan ekonomi, memperkuat kesejahteraan lewat pendidikan dan pemberdayaan usaha mandiri, mengedepankan kebebasan keluarga dalam memilih kegiatan sesuai kebutuhan, serta membangun jati diri yang kuat dan kebanggaan masyarakat, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Prawirodirjan dinilai sudah berjalan secara optimal dan sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga di wilayah kelurahan Prawirodirjan, namun masih terdapat tantangan dan hambatan dalam proses implementasinya, berikut saran tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kestabilan dan ketersediaan pendanaan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan diperlukan upaya untuk memastikan pendanaan yang lebih stabil dan berlanjut sepanjang tahun. Pemerintah daerah ataupun pihak terkait hendaknya dapat mengalokasikan anggaran secara lebih teratur.
2. Penguatan regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), regenerasi kader dan pengelola program perlu diperkuat melalui pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas secara terstruktur. Hal ini sangat penting agar para kader yang baru memiliki kompetensi yang mencukupi untuk dapat menjalankan program serta menjaga keberlangsungan pelaksanaan kegiatan di masyarakat.
3. Optimalisasi koordinasi antar lintas sektor dan pihak terkait, hal ini sangat penting untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan program, koordinasi perlu diperkuat antara

Pemerintah Kelurahan, BKKBN, DP3AP2KB, sektor kesehatan, pendidikan dan pihak masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan yang jelas, termasuk evaluasi rutin dan komunikasi terbuka, dapat memperlancar proses implementasi program di masyarakat.

